

MEDIA DAN KRISIS POLITIK **(Analisis Wacana Terhadap Pemberitaan KOMPAS mengenai** **Krisis Politik Thailand, Edisi Maret-Mei 2010)**

Oleh:

Agus Triyono, S.Sos., MSi

(Program Studi Broadcasting, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang)
Jalan Nakula I no. 5 - 11 Semarang
telp. (024) 3517261- 3520165
e-mail: agustriyono7gmail.com

Joni Rusdiana, S.Sos

(Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Boyolali)

Abstract

This study aims to examine the preaching of KOMPAS will be Thailand's political crisis. Questions to be answered in this study is how KOMPAS preach political crisis in Thailand. For this purpose, the researchers used a method of discourse analysis. Researchers analyzed at the level of textual and contextual KOMPAS news articles about Thailand's political crisis of 2010 for the March-May 2010. The first findings are at the beginning of Thailand's political crisis took place, KOMPAS does not cover the event directly. News about the crisis KOMPAS is taken from the source media and foreign news agencies such as: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP and fro. Only when the escalation of the crisis began peaking KOMPAS send reporters to cover the event directly. When the crisis began to subside KOMPAS pull back and re-use media journalists and foreign news agencies as sources of news. Second, related to the role of the media, in the context of Thailand's political crisis was initially KOMPAS acts as a transmitter, reported the news in an objective, accurate, neutral, and balanced. Then when the crisis began to escalate, it looks KOMPAS started giving appraisals. Lastly, KOMPAS gradually began to show partiality to the protesters commonly referred to as the "Red Shirt".

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mencermati pemberitaan KOMPAS terkait krisis politik Thailand. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini terutama adalah bagaimana KOMPAS memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand. Untuk kepentingan ini maka peneliti menggunakan metode analisis wacana. Peneliti menganalisa pada level tekstual dan kontekstual artikel-artikel berita KOMPAS seputar krisis politik Thailand 2010 untuk edisi Maret-Mei 2010. Penelitian ini mendapati dua temuan utama yaitu: pertama, pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, KOMPAS tidak melakukan liputan secara langsung. Berita-berita seputar krisis tersebut diambil KOMPAS dari sumber media dan kantor berita luar negeri seperti: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO. Baru ketika eskalasi krisis mulai memuncak KOMPAS mengirimkan wartawanya untuk melakukan liputan secara langsung. Ketika krisis mulai mereda KOMPAS menarik pulang wartawannya dan kembali menggunakan media dan kantor berita asing sebagai sumber berita. Kedua, terkait peran media, dalam konteks krisis politik Thailand awalnya KOMPAS berperan sebagai transmitter, melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berimbang. Kemudian ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka KOMPAS terlihat mulai memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara berangsur KOMPAS mulai menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa disebut sebagai kelompok "Red Shirt".

Kata Kunci : *Thailand, Krisis, Kompas*

Pendahuluan

Krisis politik selalu menarik perhatian media massa untuk memberitakannya. Krisis politik sangat memenuhi nilai berita yaitu konflik. Konflik bisa berupa peristiwa perang, aksi demonstrasi, tindak kriminal, ataupun kerusakan dan kekacauan yang lain. Termasuk juga krisis politik biasanya sarat dengan konflik sehingga membuatnya menarik untuk diangkat sebagai berita oleh media massa.

Krisis politik Thailand, adalah salah satu peristiwa krisis politik yang mendapat perhatian serius oleh media massa. Krisis politik yang terjadi berkepanjangan di Negara Thailand itu mendapat perhatian serius bukan hanya oleh media massa Thailand tapi juga media massa dan kantor berita asing.

Termasuk media asing bagi Thailand yang memberitakan krisis politik di negara ini adalah *KOMPAS*. Sebagaimana juga media yang lain, *KOMPAS* terlihat intens memberitakan peristiwa seputar krisis politik yang terjadi di Thailand. Sejak krisis politik di Thailand mulai meningkat, *KOMPAS* terus memberitakan peristiwa tersebut dengan intensitas yang tinggi. Meskipun krisis tersebut berada di luar negeri, sejak eskalasi krisis mulai memuncak nyaris setiap hari *KOMPAS* memberitakannya.

Dari sini peneliti tertarik untuk mencermati bagaimana *KOMPAS* memberitakan krisis politik yang terjadi di Thailand dalam rentang waktu Bulan Maret-Mei 2010? Kajian ini bermaksud terutama untuk mengetahui cara, sikap dan peran *KOMPAS* dalam mewacanakan krisis politik Thailand yang terjadi pada Maret-Mei 2010.

Untuk kepentingan ini maka peneliti menggunakan metode analisis wacana. Pada level mikro, analisis wacana dilakukan secara tekstual, dimana teks dianalisis secara linguistik. Teks yang dimaksud dapat berupa simbol verbal berupa kata-kata, ataupun teks dalam wujud simbol non verbal seperti gambar, denah dan bentuk grafis lainnya. Untuk melengkapi analisis pada level mikro, dilakukan juga analisis pada level makro. Norman Fairclough menyebut analisis pada level makro ini dilakukan terhadap dimensi *sociocultural practice* (Eriyanto, 2009: 288). Pada level makro, dilakukan analisa terhadap faktor-faktor sosial budaya yang berhubungan dengan konteks. Konteks yang dimaksud dapat berupa situasi di luar berita atau teks, kondisi internal media atau hubungan media dengan masyarakat.

Telaah Pustaka

1. Krisis Politik

Krisis dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kekacauan, baik nyata maupun sekedar perasaan, terhadap keteraturan sosial (Raboy dan Dagenais, 1992: 3). Setiap krisis terjadi karena adanya kondisi yang berubah. Krisis dapat terjadi pada berbagai dimensi: masyarakat, keluarga, sistem nilai, ekonomi, lingkungan, perjuangan dan dimensi lainnya.

Pawito (2009: 268-269) mengutip Robinson menyebutkan dua cara dalam melihat krisis, yaitu pendekatan yang bersifat substantif dan prosedural. Pendekatan pertama menekankan pada tahap-tahap eskalasi krisis yang berlangsung. Pendekatan kedua menekankan pada dimensi-dimensi atau tanda-tanda krisis. Terdapat 12 dimensi atau tanda-tanda yang menunjukkan kondisi krisis, yaitu:

1. Krisis seringkali merupakan ujung dari rangkaian peristiwa-peristiwa dan tindakan-tindakan.
2. Krisis merupakan situasi di mana tuntutan untuk mengambil tindakan semakin meningkat di kalangan orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat.
3. Krisis dengan sendirinya mengancam tujuan kalangan-kalangan yang terlibat.
4. Krisis diikuti oleh perkembangan yang membawa konsekuensi yang menentukan masa depan para partisipan.
5. Krisis terjadi lebih merupakan suatu konvergensi dari peristiwa-peristiwa yang kemudian menghasilkan lingkungan atau kondisi-kondisi baru.
6. Krisis menghasilkan ketidakmenentuan situasi dan pilihan formula untuk menanggapi situasi.
7. Krisis mengurangi penguasaan terhadap kejadian-kejadian beserta pengaruh-pengaruhnya.
8. Krisis menghasilkan ketegangan dan kecemasan di antara partisipan.
9. Krisis merupakan suatu keadaan dimana informasi yang dapat diperoleh partisipan biasanya tidak memadai.
10. Krisis meningkatkan waktu serba ter tekan bagi kalangan-kalangan yang terlibat.
11. Krisis biasanya ditandai oleh perubahan atau pergeseran pola hubungan di antara kalangan yang terlibat.

12. Krisis meningkatkan ketegangan hubungan di antara partisipan.

Kondisi krisis, di dalamnya selalu terdapat perubahan, baik sebagai pemicu krisis maupun sebagai tujuan yang tidak diharapkan ataupun direncanakan. Perubahan yang selalu menyertai krisis, baik diharapkan maupun tidak diharapkan, selalu memancing pertanyaan yang bersifat ideologis atau politis.

Dalam konteks politik, konsep krisis digunakan untuk menunjukkan keadaan suatu tatanan atau sistem dalam ancaman serius (Pawito, 2009: 267). Krisis politik bisa disebabkan oleh konflik agama, ras, suku, serangan teroris, aksi separatisme, atau pernyataan kontroversial yang dilontarkan tokoh politik.

Krisis politik dapat berlangsung dalam berbagai wujud, misalnya: revolusi, kudeta, huru-hara, perlawanan umum, pemberontakan maupun perang kemerdekaan. Revolusi merupakan perubahan nilai dan mitos yang dominan dalam masyarakat, terutama menyangkut lembaga politik, struktur sosial, kegiatan dan kebijakan pemerintah, yang berlangsung dengan kekerasan, mendasar, dan dalam waktu cepat. Berbeda dengan revolusi, kudeta, huru-hara, perlawanan umum, pemberontakan dan perang kemerdekaan tidak menghasilkan perubahan struktur sosial dan nilai-nilai sosial. Kudeta hanya mengubah kepemimpinan dan mungkin juga kebijakan. Huru-hara dan perlawanan umum hanya mengubah kebijakan, kepemimpinan dan lembaga politik. Sementara perang kemerdekaan merupakan perjuangan komunitas dalam usaha menentang kekuasaan komunitas asing (Huntington, 2004: 315).

2. Media dan Krisis Politik

Ibnu Hamad mengutip Brian McNair mengungkapkan, setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa untuk diliput. Pertama, dewasa ini politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempun-

yai nilai berita. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa. (Hamad, 2004: 1).

Sementara Pawito secara spesifik menyebutkan alasan media massa selalu menaruh perhatian besar pada krisis politik. *Pertama*, krisis politik yang terjadi mengundang perhatian publik dan setiap pemberitaan mengenai krisis yang terjadi pasti menarik iklan. *Kedua*, krisis politik pada dasarnya selalu berkenaan dengan kepentingan bersama masyarakat dan media massa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada publik (Pawito, 2009: 269).

Media merupakan tulang punggung demokrasi. Media menyediakan informasi politik bagi elit maupun masyarakat. Media membantu kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat kemudian menyediakan saluran untuk terjadinya dialog. Media juga berperan sebagai pengawas dari kemungkinan penyimpangan, ketidakadilan dan praktek kesalahan lainnya.

Secara sistematis Harold Lasswell telah memberikan kesimpulan terkait peran media bagi masyarakat, yaitu sebagai: pengawasan lingkungan, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungan, dan transmisi warisan budaya. Charles Wright kemudian menambahkan fungsi yang keempat yaitu fungsi hiburan (McQuail, 1994: 71).

Keempat peran media massa tadi merupakan peran yang dimainkan media dalam kondisi masyarakat secara umum. Dalam kondisi krisis, media juga memainkan peran. Dalam konteks krisis politik maka media memainkan peran lebih spesifik.

Pawito (2009: 270) menyebutkan tiga peran media dalam konteks krisis politik. *Pertama*, di awal krisis media massa berperan sebagai agen penyelaras dalam masyarakat. Media massa melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berimbang. *Kedua*, ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka peran media mulai bergeser. Media massa tidak lagi berperan sebagai pelapor yang jujur dan objektif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun mengambil posisi tertentu sesuai dengan kepentingan-kepentingan media. *Ketiga*, media secara berangsur berpihak pada salah satu kekuatan yang terlibat dalam konflik

seiring dengan berkembangnya krisis.

Temuan dan Diskusi

1. Perjalanan Krisis Politik Thailand Sejak 2006

Krisis politik Thailand 2010 merupakan reaksi atas kudeta militer terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 19 September 2006. Dalam aksi kudeta tersebut, militer menyebut diri mereka sebagai *"The Reform Committee in the Democratic System with the Monarchy as Head of State."* Dalam pandangan militer, demokrasi di bawah pemerintahan Thaksin bermakna kediktatoran militer sedangkan reformasi mereka makna sebagai dihapusnya Undang-Undang Dasar 1997, pembubaran parlemen, dan mendeklarasikan undang-undang perang (Ungpakorn, 2007: 8).

Thaksin, yang memenangkan pemilihan secara sah pada pemilu 2001 dan 2005, dituding tidak cakap dalam mengelola negara, menyalahgunakan kekuasaan, dan terlibat kasus korupsi dan kolusi. Kasus tersebut kemudian dibawa ke pengadilan. Dalam pengadilan Thaksin terbukti melakukan korupsi, menerima suap, melakukan investasi ilegal, dan melakukan pelanggaran pajak. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Thaksin. Selain itu, istri Thaksin juga dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti telah menyalahgunakan kekayaan negara.

Namun Thaksin dan istrinya tidak sempat menjalani hukuman karena telah meninggalkan Thailand untuk mengasingkan diri. Thaksin meninggalkan Thailand sejak aksi protes terhadap dirinya digelar oleh kelompok yang menamakan dirinya *People's Alliance for Democracy* (PAD) atau biasa juga disebut *"Yellow Shirts."* Protes ini sudah digelar sejak Februari 2006. Para pemrotes menuntut pemberhentian Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan partai pendukungnya, yaitu Thai Rak Thai (TRT).

Sejak tumbangnya pemerintahan Thaksin, maka pemerintahan dipegang oleh militer di bawah pimpinan Jendral Purnawirawan Surayud Chulanot. Di bawah pemerintahan darurat militer, media di Thailand mendapat kontrol sangat ketat. Militer melakukan kontrol terhadap media dengan memasukkan anggota mereka

pada setiap kantor. Bahkan pemerintahan darurat militer menutup website yang kritis terhadap pemerintah, seperti yang dimiliki *Midnight University*. Media asing juga tidak luput dari sensor oleh pemerintahan darurat militer Thailand. BBC dan televisi asing lainnya mengalami sensor, jaringan lokal mereka diputus dan iklan-iklan yang menyebutkan atau menampilkan Thaksin diganti (Ungpakorn, 2007: 8).

Pemerintahan darurat militer berkuasa tidak lama, hanya sampai tahun 2007. Menjelang akhir 2007 pemerintahan darurat militer mengakhiri kekuasaannya dan mengembalikan pada pemerintahan sipil dengan menggelar pemilu.

Pada pemilu ini partai pendukung Thaksin, Thai Rak Thai (TRT), tidak mengikuti pemilu karena sudah dibekukan. Namun pada prakteknya para pendukung Thaksin membentuk partai baru yaitu *People's Power Party* (PPP). Dengan kata lain *People's Power Party* (PPP) sebenarnya merupakan bentukan ulang dari partai Thai Rak Thai (TRT).

Strategi politik para pendukung Thaksin ini membuahkan hasil. *People's Power Party* (PPP) berhasil memenangkan pemilihan parlemen dan Samak Sundaravej terpilih sebagai perdana menteri. Kemenangan yang diperoleh *People's Power Party* (PPP) dan Samak Sundaravej merupakan kemenangan yang besar.

Meskipun *People's Power Party* (PPP) dan Samak Sundaravej memenangkan pemilihan secara sah namun tidak diterima secara penuh oleh seluruh masyarakat Thailand. Pemerintahan Sundaravej mendapatkan protes keras karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Thaksin Shinawatra. Protes datang dari kelompok yang sama dengan pemrotes Thaksin pada tahun 2006, yaitu kelompok *People's Alliance for Democracy* (PAD). Partai Demokrat, sebagai partai oposisi pada masa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, berada di belakang kelompok ini (Kane, 2010).

Aksi protes yang terus berlangsung memaksa Perdana Menteri Samak Sundaravej untuk mundur dari jabatannya. Sundaravej pun tidak mampu menghadapi tekanan para pemrotes dan akhirnya melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri.

Selepas pengunduran diri Samak Sun-

daravej digelar pemilu yang ke dua sejak kudeta militer 2006. Pada pemilu kedua ini kubu Thaksin melalui People's Power Party (PPP) kembali memenangkan pemilihan dan Somchai Wongsawat terpilih sebagai perdana menteri Thailand.

Pemerintahan di bawah Wongsawat pun tidak luput dari protes yang dilancarkan oleh kelompok *People's Alliance for Democracy* (PAD). Wongsawat dianggap tidak berbeda dengan Sundaravej yaitu kepanjangan tangan Thaksin. Wongsawat merupakan saudara ipar Thaksin dan pada masa pemerintahan Samak Sudaravej menjabat sebagai menteri pendidikan.

Sama seperti protes-protes sebelumnya, *People's Alliance for Democracy* (PAD) juga menuntut Wongsawat untuk mundur dari jabatannya. Wongsawat pun tidak mampu mengatasi protes dan kemudian memilih mundur dari jabatan perdana menteri.

Pada Desember 2008 pemilihan umum untuk yang ketiga kalinya pasca kudeta militer 2006 kembali digelar. Pada pemilu ini Partai Demokrat, yang sebelumnya selalu menjadi partai oposisi sejak pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, berhasil memenangkan pemilihan. Partai Demokrat menjadi pemenang dengan selisih suara yang tipis. Kemenangan ini membawa Abhisit Vejjajiva menduduki posisi sebagai Perdana Menteri Thailand yang baru.

Pemerintahan di bawah Vejjajiva mendapat dukungan dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Sejak awal memang Raja Thailand Bhumibol Adulyadej mendukung Partai Demokrat untuk melakukan perubahan politik di Thailand. Dukungan tersebut juga diberikan Raja Thailand Bhumibol Adulyadej saat kudeta militer 2006 berlangsung. Kudeta militer 2006 merupakan kudeta pertama yang mendapat dukungan dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej.

Ketika diangkat sebagai perdana menteri, Vejjajiva berjanji pemerintahannya akan mengembalikan stabilitas politik Thailand yang terus dilanda krisis selama ini. Vejjajiva juga berjanji akan memperbaiki ekonomi Thailand dengan bertumpu pada sektor pariwisata.

Pemerintahan baru di bawah Vejjajiva kembali menghadapi aksi protes. Kali ini protes datang dari pendukung Thaksin yang

menamakan diri mereka dengan sebutan "Red Shirt". Red Shirt menuduh Vejjajiva telah melakukan kecurangan dalam pemilu 2008 sehingga berhasil memenangkan pemilihan. Selama ini, meskipun kalangan militer dan politisi cenderung membenci Thaksin, namun tidak demikian dengan rakyat. Selama pemerintahannya, Thaksin banyak memberikan biaya berobat ringan dan pinjaman berbunga ringan kepada rakyat. bahkan beberapa sekolah mendapat komputer secara cuma-cuma (*KOMPAS*, 21 Maret).

Red Shirt pun berbalik memprotes pemerintahan Abhisit Vejjajiva. Para pemrotes mengultimatum Abhisit Vejjajiva untuk mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri. Red Shirt juga menuntut parlemen agar dibubarkan dan menggelar kembali pemilihan umum. Ultimatum tersebut dikeluarkan dalam aksi protes yang dilakukan puluhan ribu pendukung Thaksin pada Minggu (14/3) di tengah Kota Bangkok (*KOMPAS*, 15 Maret).

Dalam menghadapi aksi protes Red Shirt, awalnya pemerintah bersikap lunak. Bahkan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva secara jelas menyampaikan tidak akan melakukan kekerasan untuk menumpas para pemrotes. Sebagaimana pernyataannya pada media:

"Saya memiliki hak untuk menyelesaikan masa jabatan. Akan tetapi, tidak ada rencana untuk menumpas aksi protes yang sejauh ini damai dan tertib" (*KOMPAS*, 15 Maret).

Namun setelah pemrotes menduduki tempat-tempat strategis dan menyebabkan kerusakan terhadap aset-aset pemerintah maka pemerintah memberlakukan status darurat militer. Meskipun pemerintah berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan, namun dengan memberlakukan status darurat militer berarti aparat keamanan diberi kebebasan mengambil tindakan untuk mengatasi para pemrotes.

Protes yang dilancarkan kelompok Red Shirt semakin meluas. Sempat beberapa kali terjadi bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan. Meskipun dialog antara perwakilan pemrotes dengan pemerintah beberapa kali digelar, namun tak satupun yang menghasilkan kesepakatan. Masing-masing pihak tetap kukuh dengan pendiriannya.

Kelompok Red Shirt pun semakin meningkatkan tekanan pada pemerintah agar tuntutan mereka dipenuhi. Pada Rabu (7/4) pemrotes menyerbu masuk parlemen yang sedang bersidang. Ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah media milik kelompok pendukung Thaksin ditutup pemerintah. Sejumlah pemrotes terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat penutupan berlangsung.

Setelah sekian waktu menunjukkan sikap sabar, akhirnya Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva memerintahkan aparat keamanan untuk membubarkan para pemrotes pendukung Thaksin Shinawatra. Ketegangan pun memuncak. Bentrok antara para pemrotes dengan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan. Dalam bentrokan yang berlangsung Sabtu-Minggu (10-11 April) sedikitnya 14 pemrotes anti Pemerintah Thailand, seorang wartawan Reuters dan lima tentara tewas. Ini merupakan bentrokan terburuk dalam sejarah Thailand sejak 1992 (*KOMPAS*, 12 April).

Pasca bentrokan terburuk tersebut ternyata kelompok Red Shirt tidak berhenti, justru semakin meningkatkan tekanan pada pemerintah. Akibatnya pada Jumat (14/5) terjadi lagi bentrok antara pemrotes dengan aparat keamanan yang menewaskan 5 orang dan 92 orang luka-luka. Satu hari sebelumnya, Kamis (13/5) Mayor Jenderal Khatiya Sawasdiapol ditembak oleh penembak gelap saat berbicara di depan wartawan. Sawasdiapol merupakan pendukung kelompok Red Shirt sehingga oleh militer dianggap sebagai pembangkang (*KOMPAS*, 17 Mei).

Penembakan terhadap Sawasdiapol membuat pemrotes semakin agresif melawan aparat keamanan. Mereka terus melancarkan aksi protes dan perlawanan sampai Kamis (20/5) mereka mulai meninggalkan Bangkok untuk kembali ke daerah mereka masing-masing.

2. *KOMPAS* dan Krisis Politik Thailand

a. Reportase

Terkait kasus krisis politik yang terjadi di Negara Thailand, selama Maret-Mei 2010 *KOMPAS* terlihat intens memberitakannya. Selama tiga bulan berturut-turut *KOMPAS* menampilkan lebih dari 70 artikel yang memberitakan mengenai krisis politik di negara tersebut.

Mayoritas artikel ditempatkan *KOMPAS* pada rubrik *Internasional*. Hanya beberapa kali *KOMPAS* menampilkan pada halaman pertama, namun bukan sebagai *headline*.

Dari hasil pengamatan, peneliti mendapati bahwa pada awal-awal krisis politik yang terjadi di Thailand 2010 yaitu tanggal 1 Maret - 11 April, berita terkait kasus tersebut diambil *KOMPAS* dari beberapa media dan kantor berita luar negeri. Keterangan ini dapat dilihat pada akhir setiap berita, *KOMPAS* selalu mencantumkan sumber-sumber media dan kantor berita yang digunakannya. Media dan kantor berita yang dimaksud yaitu: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO.

Dengan kata lain, pada awal-awal pemberitaan mengenai krisis politik Thailand 2010, *KOMPAS* tidak melakukan reportase langsung. Semua data, fakta dan pernyataan yang dikutip menjadi berita bersumber dari media dan kantor berita yang disebut di atas. Maka sebagai konsekuensinya *KOMPAS* harus mencantumkan sumber-sumber berita tersebut di akhir berita.

Baru setelah krisis politik mulai memuncak, *KOMPAS* mengirim wartawannya, Francisca Romana, untuk melakukan liputan secara langsung. Memuncaknya krisis ditandai terjadinya bentrok fisik antara demonstran dengan aparat keamanan sejak tanggal 8 April 2010 dan puncaknya tanggal 10-11 April 2010.

Sejak terjadinya bentrok tanggal 10-11 April tersebut sepertinya *KOMPAS* melihat krisis politik yang terjadi di Thailand sudah sangat serius sehingga perlu mengirim wartawan untuk meliput secara langsung. Maka berita *KOMPAS* mengenai krisis politik Thailand edisi 12 April mencantumkan nama wartawan Fransisca Romana. Nama Fransisca Romana dicetak tebal tampaknya untuk menegaskan pada masyarakat bahwa terkait krisis politik Thailand 2010 *KOMPAS* sudah mengirim wartawannya untuk melakukan liputan secara langsung. Tentu saja hal ini terkait dengan kredibilitas *KOMPAS* sebagai salah satu media nasional di Indonesia.

Setelah krisis politik mulai mereda sepertinya *KOMPAS* menarik pulang wartawannya, Fransisca Romana, dan kembali lagi seperti di awal-awal krisis berlangsung mengambil berita dari media dan kantor berita asing. Ini dapat dilihat pada berita mengenai krisis politik Thailand edisi 17 Mei, di akhir berita *KOMPAS* kembali menampilkan sumber berita dari AP, AFP, REUTERS, BBC, dan FRO (*KOMPAS*, 17 Mei).

Fenomena ini memang sudah lazim. Media, baik nasional maupun lokal dalam memberitakan peristiwa yang terjadi di luar negeri, mereka tidak meliputnya secara langsung melainkan berlangganan berita pada kantor-kantor berita internasional. Kecuali untuk momen-momen atau kejadian-kejadian khusus yang sangat penting, media, terutama media nasional, mengirimkan jurnalisnya untuk meliput secara langsung. Demikian juga media-media lokal di Indonesia biasanya berlangganan berita dari kantor berita nasional terutama untuk berita-berita nasional yang terjadi di Jakarta dan daerah-daerah yang lain.

b. Peran *KOMPAS*

Pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, *KOMPAS* berperan sekedar memberitakan fakta, anggapan dan pernyataan-pernyataan secara objektif dan netral. Pada tanggal 1 Maret misalnya, *KOMPAS* memuat artikel dengan judul "Ledakan di Bangkok: PM Abhisit Perintahkan Keamanan Diperketat." Ledakan ini terjadi pada Minggu (28/2), sehari setelah mahkamah agung Thailand memutuskan menyita 1,4 miliar dollar AS kekayaan Thaksin karena ditetapkan telah memperkaya diri dengan merugikan negara selama lima tahun berkuasa (*KOMPAS*, 1 Maret).

Selanjutnya *KOMPAS* juga mengutip beberapa pernyataan terkait peristiwa tersebut. Pernyataan datang misalnya dari Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva dan Kepala Polisi Metropolitan Letjen Santhan Chayanon. Keduanya mengatakan ledakan bom di Bangkok adalah bermotif politik, namun demikian keduanya belum berani menuding kelompok tertentu berada di belakang aksi tersebut

(*KOMPAS*, 1 Maret).

Sampai tanggal 15 Maret *KOMPAS* masih menjalankan fungsinya menyampaikan berita apa adanya. Pada Senin (15/3) *KOMPAS* memuat artikel dengan judul "*Abhisit Diultimatum: Warga Thailand Sudah Muak dengan Protes.*" Pada bagian *lead*, *KOMPAS* menulis puluhan ribu pendukung Thaksin Shinawatra mengeluarkan ultimatum agar pemerintah segera membubarkan parlemen. Sebagai *transmitter*, *KOMPAS* menyampaikan seluruh data, fakta, dan pernyataan terkait protes yang dilakukan kelompok Red Shirt apa adanya. *KOMPAS* menyampaikan berapa jumlah pemrotes, bagaimana suasana protes, apa saja tuntutan mereka dan sebagainya. *KOMPAS* juga menyampaikan bagaimana aksi protes yang digelar di pusat Kota Bangkok menyebabkan aktifitas di kota tersebut lumpuh. Kemudian *KOMPAS* juga menyampaikan bagaimana sikap dan pernyataan pemerintah, terutama perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, terkait aksi protes tersebut.

Masih menjalankan fungsinya sebagai *transmitter*, *KOMPAS* sesekali menampilkan kontradiksi-kontradiksi dan pernyataan saling menyerang dari para pihak yang terlibat konflik. Misalnya pihak pemerintah yang menganggap Thaksin bersalah karena telah melakukan korupsi dan para pemrotes telah mengganggu stabilitas negara maka perlu ditindak tegas. Sementara dari pihak pemrotes Abhisit berkuasa secara tidak sah. Partai Demokrat dianggap telah melakukan kecurangan dalam pemilu.

Pada tahap berikutnya, *KOMPAS* mulai memberikan penilaian-penilaian dan analisa seiring eskalasi konflik. Misalnya ketika pemerintah memperluas undang-undang soal keamanan dan mempersenjatai para petugas yang menjaga tempat-tempat penting. *KOMPAS* memberikan penilaian dan analisisnya bahwa kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan bentrok antara pemrotes dengan aparat.

Kemudian secara berangsur *KOMPAS* mulai menampakkan keberpihakan sambil sesaat tetap memberikan penilaian-penilaian dan analisa-analisa.

KOMPAS terlihat cenderung menyampaikan berita dari sudut kelompok pemrotes. *KOMPAS* terus menyampaikan aksi-aksi yang dilakukan kelompok pendukung Thaksin tersebut, bagaimana kondisi, tuntutan, dan pernyataan-pernyataan mereka. Sementara pemberitaan untuk pihak pemerintah cenderung mendapat porsi lebih sedikit.

Keberpihakan *KOMPAS* pada kelompok pemrotes semakin terlihat ketika pemerintah Thailand memperluas undang-undang keamanan dan aparat keamanan dipersenjatai. Terlebih lagi ketika pemerintah memberlakukan status darurat militer, *KOMPAS* terlihat semakin jelas menyampaikan penilaian dan kritik. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan bentrokan.

Simpulan

Dari data serta analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Pada awal-awal krisis politik Thailand berlangsung, *KOMPAS* tidak melakukan liputan secara langsung. Berita-berita seputar krisis tersebut diambil *KOMPAS* dari sumber media dan kantor berita luar negeri seperti: Bangkok Post, Reuters, The Nation, BBC, AP, AFP dan FRO. Baru ketika eskalasi krisis mulai memuncak, dengan ditandai oleh terjadinya bentrokan yang sangat tragis, *KOMPAS* mengirimkan wartawanya untuk melakukan liputan secara langsung. Kemudian setelah krisis mulai mereda *KOMPAS* menarik pulang wartawannya dan kembali menggunakan media dan kantor berita asing sebagai sumber berita.
2. Terkait peran media, dalam konteks krisis politik Thailand awalnya *KOMPAS* berperan sebagai *transmitter*, melaporkan berita secara objektif, akurat, netral, dan berimbang. kemudian ketika krisis mulai mengalami eskalasi, maka *KOMPAS* terlihat mulai memberikan penilaian-penilaian. Terakhir, secara berangsur *KOMPAS* mulai menunjukkan keberpihakan pada pemrotes yang biasa disebut sebagai kelompok "Red Shirt".

Daftar Pustaka

- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Huntington, Samuel P. 2004. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, terj. Sahat Simamora. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kane, Seth. "Thailand's Political Crisis: Which Color Is Conservative?" dalam SAIS Review, Volume 30, Number 1, Winter-Spring 2010, pp. 105-108
- McQuail, Denis. 1994. *Teori Komunikasi Massa*, terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga
- Pawito. 2009. *Komunikasi politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra
- Raboy, Marc dan Bernard Dagenais. 1992. *Introduction: Media and the Politics of Crisis*. dalam Marc Raboy dan Bernard Dagenais. *Media, Crisis and Democracy*. London: SAGE Publication
- Ungpakorn, Giles Ji. 2007. *A Coup for the Rich*. Thailand's Political Crisis. Bangkok: Workers Democracy Publishers